

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, observasi, serta analisis menggunakan teori Komunikasi Publik, dapat disimpulkan bahwa penyebaran informasi publik oleh Humas DPRD Kota Yogyakarta melalui media sosial dan website telah berjalan secara cukup efektif dalam mendukung terwujudnya transparansi pemerintahan. Strategi komunikasi yang dijalankan tidak hanya berfokus pada publikasi kegiatan kelembagaan, tetapi juga berupaya membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.

1. Penyediaan Informasi

Humas DPRD Kota Yogyakarta berhasil menjalankan fungsi penyedia informasi publik dengan menyampaikan berita kegiatan, agenda sidang, serta kegiatan sosial melalui website resmi (dprd.jogjakota.go.id) dan akun Instagram (@[dprd.jogja](https://www.instagram.com/dprd.jogja)). Kedua kanal ini menampilkan informasi faktual, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Website berfungsi sebagai arsip resmi kelembagaan, sementara Instagram menonjolkan sisi visual dan aktualitas kegiatan dewan.

2. Media Komunikasi

Pemanfaatan dua media digital tersebut menunjukkan pemahaman humas terhadap karakteristik audiens. Website digunakan untuk

menyampaikan informasi yang bersifat formal dan dokumentatif, sedangkan Instagram menjadi sarana komunikasi visual yang ringan dan mudah diterima masyarakat. Strategi ini sejalan dengan prinsip komunikasi publik modern yang menekankan *openness* dan *engagement*.

3. Interaksi dengan Masyarakat

Interaksi publik tercermin melalui kolom komentar, fitur polling, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dipublikasikan. Meskipun tingkat komentar belum tinggi, data *insight* dan jumlah kunjungan menunjukkan adanya keterlibatan pasif yang cukup besar. Hal ini menandakan bahwa masyarakat mengikuti aktivitas DPRD meskipun tidak selalu berkomentar langsung.

4. Tanggapan Publik

Respon masyarakat terhadap konten DPRD relatif positif, terlihat dari jumlah *followers*, *likes*, dan pengunjung website yang terus meningkat (total 685.893 kunjungan hingga Oktober 2025). Publik menilai media sosial dan website DPRD bermanfaat sebagai sumber informasi resmi, terutama dalam memahami fungsi legislatif secara lebih terbuka. Hal ini memperkuat citra DPRD sebagai lembaga yang transparan dan komunikatif.

Secara keseluruhan, komunikasi publik yang dijalankan Humas DPRD Kota Yogyakarta melalui media sosial dan website telah mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Namun, perlu

peningkatan pada aspek interaksi dua arah agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat terlibat aktif dalam ruang komunikasi digital pemerintahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran untuk Humas DPRD Kota Yogyakarta agar dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi publik melalui media sosial dan website:

1. Meningkatkan variasi dan kreativitas konten dengan mengoptimalkan fitur interaktif seperti *Reels*, *Stories*, dan *polling* agar komunikasi publik tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif dan menarik bagi masyarakat muda.
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap insight dan engagement media sosial untuk menilai efektivitas pesan serta menyesuaikan strategi komunikasi dengan kebutuhan dan minat masyarakat.
3. Memperkuat kolaborasi antarbidang dalam lembaga, khususnya antara bagian humas, sekretariat, dan anggota DPRD, agar setiap informasi yang disampaikan ke publik bersifat komprehensif, akurat, dan mudah dipahami.
4. Mengoptimalkan pengelolaan website DPRD dengan memperbarui konten lebih rutin dan memperbaiki tampilan antarmuka agar akses informasi publik semakin cepat dan ramah pengguna.

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas jumlah informan dengan melibatkan anggota DPRD dan masyarakat pengguna media sosial, agar dapat memberikan perspektif yang lebih beragam mengenai efektivitas komunikasi publik.
2. Peneliti selanjutnya dapat mengombinasikan metode kuantitatif, seperti analisis statistik engagement atau survei publik, untuk melengkapi temuan kualitatif mengenai persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD.
3. Kajian mendatang juga dapat membandingkan strategi komunikasi publik antarinstansi pemerintah daerah, atau mengeksplorasi penggunaan platform digital lain seperti TikTok, YouTube, dan Threads sebagai media baru dalam memperkuat transparansi pemerintahan.